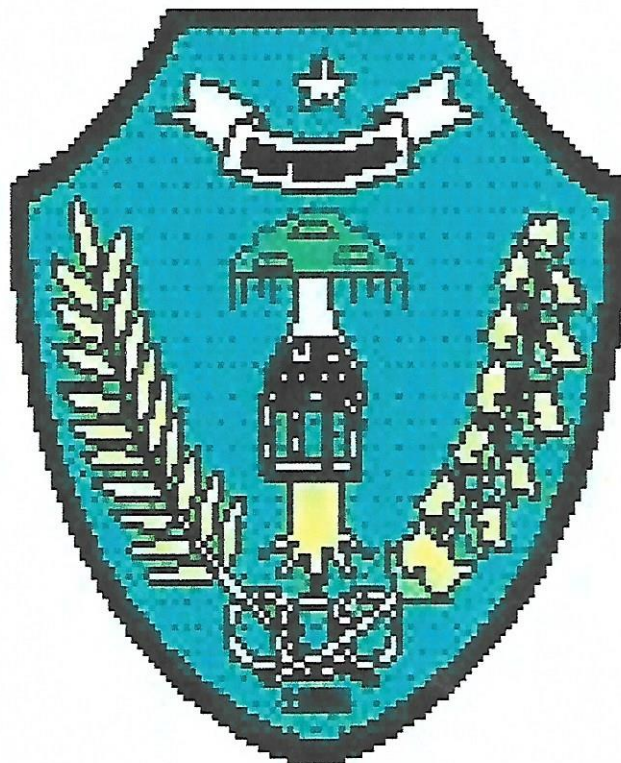


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP) TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

DINAS PETERNAKAN

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Peternakan merupakan perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024 Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Peternakan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan. Kinerja Dinas Peternakan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Dalam proses pembuatan Laporan Kinerja ini tentu masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikannya.

Kefamenanu, Februari 2025

KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,



TRIMELDUS T. TONBESI, S.Pt., M.Sc
Pembina Tk.I
NIP. 19700515 199903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Anggaran	22
BAB IV PENUTUP	23

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Peternakan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan maka Dinas Peternakan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pertanian sub bidang Peternakan di daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.

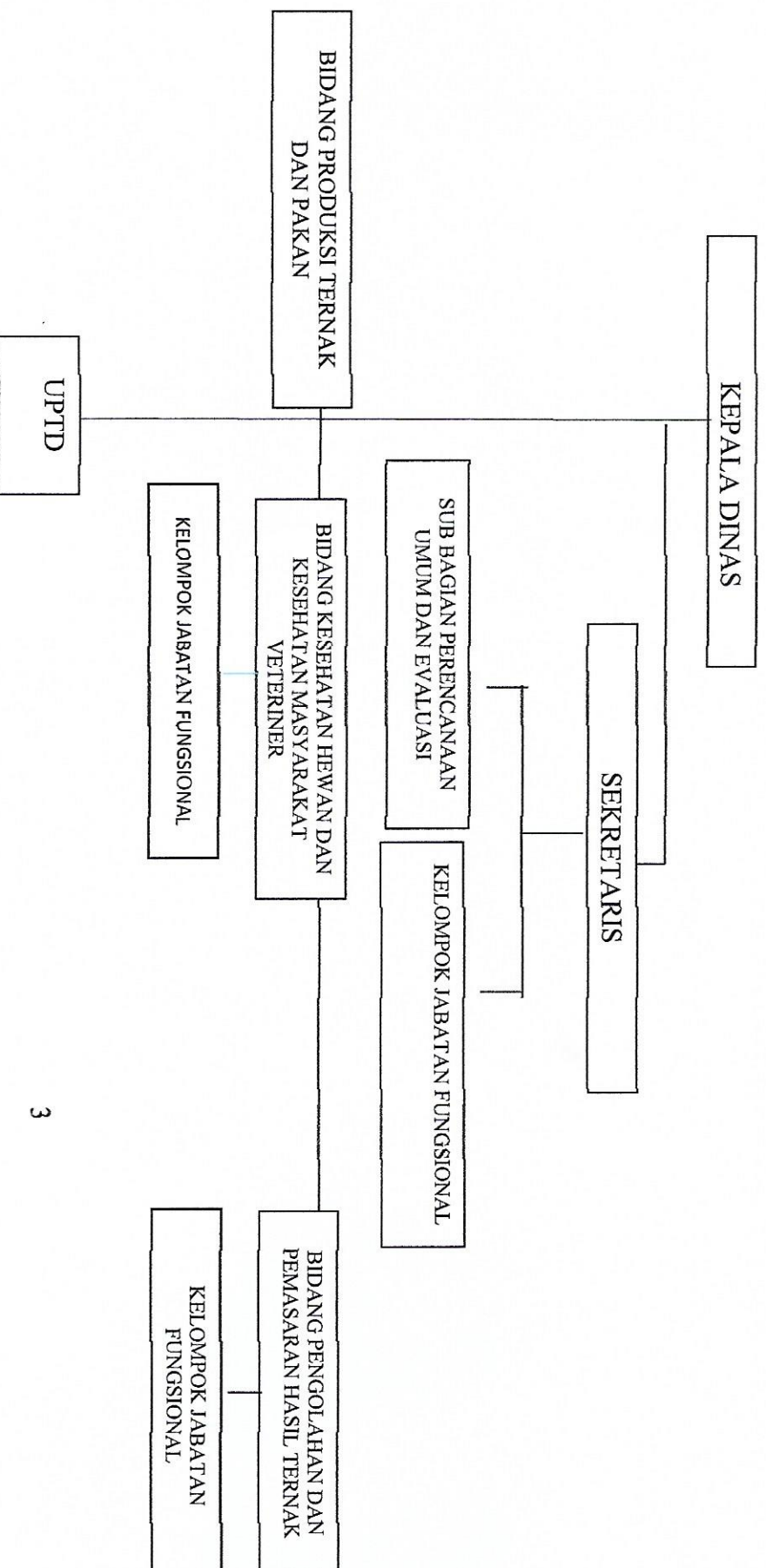
Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang peternakan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Bidang dan UPTD. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 49 TAHUN 2022, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah masalah kondisi atau hal yang harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berdampak signifikan bagi daerah dengan karakteristik penting, mendasar, mendesak, menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Peternakan periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Rendahnya Peningkatan Populasi Ternak sapi

Rendahnya produksi dan produktifitas akibat dari rendahnya mutu genetik dan terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas disebabkan oleh tidak terkendalinya pemotongan betina produktif, terjadinya seleksi negatif / tidak terkendalinya program penggemukan (ternak jantan yang memenuhi syarat bibit digemukkan).

2. Menurunnya Mutu Bibit dan Produktivitas ternak

Dua faktor utama penyebab penurunan kualitas bibit ternak di NTT umumnya dan Kabupaten TTU Khususnya adalah :

- a. Seleksi dan penyingkiran relative tidak dilaksanakan secara efektif terutama untuk ternak bibit, serta disinyalir terjadi silang dalam (inbreeding).
- b. Peternak memilih menjual ternak yang berkualitas baik karena harganya lebih tinggi.

3. Menurunnya Mutu dan Kualitas Hijauan Makanan Ternak (HMT)

Adapun faktor penurunan kualitas dan kuantitas dari Hijauan Makanan Ternak (HMT) di Kabupaten TTU adalah :

- c. Berkurangnya luasan penanaman Hijauan Makanan Ternak, hal ini disebabkan karena bertambahnya luasan lahan untuk pengembangan pertanian dan pemukiman penduduk.
- d. Berkurangnya debit air dan curah hujan yang semakin berkurang sehingga HMT yang dikembangkan tidak berkembang atau kurang berkembang dengan baik.
- e. Kurang tersedianya inovasi pengembangan HMT yang tahan panas dan kekeringan yang dapat dikembangkan dengan baik di lahan masyarakat.

4. Rendahnya Sumber Daya Manusia ;

Sumber Daya Manusia (SDM) dikelompokkan menurut kepentingannya dibagi menjadi aparat peternakan, petani, kelompok tani dan pengusaha peternakan.

Dari sisi aparat peternakan, kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan publik terutama bagi aparat kabupaten yang berhubungan dengan pengorganisasian dan penyajian data perlu ditingkatkan. Di lain pihak terbatasnya tenaga teknis seperti vaksinator dan inseminator menjadikan pencapaian tujuan peningkatan produktifitas dan populasi ternak menjadi terkendala. Tingkat pendidikan dan pengetahuan petani/ peternak yang masih rendah sehingga sulit menerima inovasi- inovasi baru terkait dengan teknologi budidaya ternak.

Kenyataan membuktikan bahwa kegagalan program peternakan terjadi karena kesalahan penyaluran bantuan bagi kelompok penerima ternak lebih banyak kepada kelompok "dadakan" yang belum mapan dalam membangun kelompok.

5. Adanya Penyakit Hewan Menular.

Penyakit hewan masih merupakan masalah yang sangat serius dalam pembangunan peternakan di NTT pada umumnya. Penyakit menular digolongkan sebagai penyakit strategis karena sifatnya antara lain memiliki dampak kerugian ekonomi yang luas, berpeluang menimbulkan wabah dan dapat menular ke manusia (zoonosis). Beberapa penyakit hewan menular strategis di NTT adalah *Brucellosis*, *Septichaemia Epizootica (SE)* pada ternak sapi, Hog Cholera pada ternak Babi, ND pada ternak Ayam.

6. Skala Usahatani Ternak relatif kecil dan tersebar.

Dominannya peternakan rakyat dengan skala usaha yang relative kecil atau terbatas ini menjadi tidak efisien akibat pemborosan sumber daya. Kecilnya pemilikan ternak karena umumnya usaha pembibitan atau penggemukan ternak sapi merupakan usaha sampingan dengan usahatani tanaman pangan atau tanaman perkebunan sebagai usaha pokok.

Usaha tani ternak juga relatif tersebar mengikuti pola pemukiman penduduk sehingga kepadatan ternak sapi baik kepadatan teknis maupun kepadatan ekonomis tidak merata di setiap daerah.

7. Rendahnya Koordinasi Antar Sektor dan Daerah serta Rendahnya Penerapan Teknologi.

Salah satu dampak pemberlakuan otonomi daerah adalah melemahnya hubungan koordinasi antar daerah, terutama antar pemerintah daerah kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi. Disinyalir berkembang persepsi di kalangan oknum pemerintah kabupaten/kota seolah-olah tidak ada lagi hubungan hirarkis dengan pemerintah provinsi. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan lemahnya komunikasi dan koordinasi pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Peternakan periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya peningkatan Populasi ternak sapi
2. Rendahnya mutu/bibit dan produktivitas ternak
3. Rendahnya kualitas Hijauan Makanan Ternak
4. Adanya Penyakit Hewan Menular.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Peternakan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran daerah kabupaten Timot Tengah Utara Nomor 150)
5. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
6. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 16 tahun 2023 tentang rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri melalui Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam."

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sector pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat

Misi 3 Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur

Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Misi 5: Pengembangan kawasan strategis daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan mengacu pada Misi ke-1 yaitu: **Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor**

pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan

Dengan misi ini, Pemerintah Daerah bertekad dan berupaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian dalam arti yang luas yakni pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, peternakan dan perikanan sebagai lokomotif yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan tupoksi Dinas Peternakan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Menumbuhkan tingkat perekonomian Masyarakat	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Jumlah Populasi Ternak					
			1. Sapi	135.596	137.421	139.246	141.271	142.896
			2. Kerbau	818	825	832	839	846
			3. Kuda	1.466	1.506	1.546	1.960	1.986
			4. Kambing	49.462	50.462	51.962	52.462	53.962
			5. Babi	88.927	91.518	94.109	96.700	98.610
			6. domba	44	46	48	50	52
			7. Ayam	262.912	275.465	287.987	300.420	330.225
			Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB	1.75	2.00	2.25	2,5	2,75
2.	Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan responsif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Skor)	56	62	68	74	80
		Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	79.87	80.44	81.01	81.58	82.15
			Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (skor)	1.9	2	2.2	2.4	2.7
		Meningkatnya Dinas Peternakan yang membangun zona integritas	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBM (OPD)	1	2	3	4	5

Sumber : Renstra Dinas Peternakan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut

Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	METODELOGI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	1.1	Jumlah Populasi Ternak	Data Populasi ternak Diperoleh Dengan Cara Format populasi Ternak diberikan Kepala Resort Peternakan di Tingkat Kecamatan untuk mengambil data populasi ternak di Masyarakat di wilayah kerja 24 Kecamatan kemudian data tersebut ditabulasi, dan dianalisa dan diolah di bidang Produksi Ternak dan Pakan, kemudian dibuatkan laporan peningkatan Populasi Ternak	Dinas Peternakan
		1.1	1. Sapi		
		1.1	2. Kerbau		
		1.1	3. Kuda		
		1.1	4. Kambing		
		1.1	5. Babi		
		1.1	6. domba		
		1.2	Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB	Data Ternak yang di IB diperoleh dari Inseminator yang melakukan penanaman Ibdari awal birahi sampai penangan partus kemudian dilakukan tabulasi, dianalisa dan disajikan dalam bentuk laporan perkembangan ternak IB	Dinas Peternakan
		1.3	Jumlah Luasan Areal Pengembangan HPT		
		1.4	Persentase penurunan Angka Kematian Ternak		
		1.4	Persentase penurunan Angka Kematian Ternak		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Skor)	Nilai evaluasi internal dari Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Peternakan adalah Hasil Penilaian terhadap penyelenggaraan system Akuntabilitas Kinerja perangkat Daerah yang mana Penilaian ini meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitaskinerja internal oleh Inspektorat Daerah. Laporan Kinerja Dinas Peternakan beserta Data dukung SAKIP disampaikan ke InspektoratnDaerah untuk dilakukan Evaluasi dan penilaian dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	Inspektorat Daerah
3	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari Nilai Presepsi PerUnsu/ Total Nilai Unsur X Nilai Penimbang	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan survey kepuasan yang dilakukan dinas peternakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Survei dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada pengguna layanan kemudian dikumpulkan dan diolah datanya untuk diperoleh nilai indeks kepuasan.	Dinas Peternakan

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 2 bulan April tahun 2004 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Jumlah Populasi Ternak	
		1. Sapi	139,246 ekor
		2. Kerbau	832 ekor
		3. Kuda	1.546 ekor
		4. Kambing	51.962 ekor
		5. Babi	94.109 ekor
		6. domba	48 ekor
		7. Ayam	287.987 ekor
		Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB	2.25 ekor
		Jumlah luasan areal Pengembangan HPT	8.00 ha/Klpk
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Persentase Menurunnya Angka Kematian Ternak	16 %
		Nilai SAKIP (Skor)	68
3	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Peternakan :

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Peternakan Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Jumlah Populasi Ternak			
	1. Sapi	139,246 ekor	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	RP. 2.054.935.390
	2. Kerbau	832 ekor	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT dalam daerah kabupaten/kota	
	3. Kuda	1.546 ekor		
	4. Kambing	51.962 ekor		
	5. Babi	94.109 ekor		
	6. domba	48 ekor		
	7. Ayam	287.987 ekor		
2	Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB	2.25 ekor		
3	Jumlah luasan areal Pengembangan HPT	8.00 ha/Klpk		
4	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak	16%	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 367.194.995
5	Nilai SAKIP (Skor)	68	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.179. 848.507
6	Nilai Kepuasan Masyarakat Indeks	81.01		

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dinas Peternakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

3.1 Membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber data
	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	1. Jumlah Populasi Ternak					Dinas Peternakan
		- Sapi	139.246	172.064	124	Tercapai	
		- Kerbau	832	873	105	Tercapai	
		- Kuda	1546	1.791	116	Tercapai	
		- Kambing	51962	68.253	131	Tercapai	
		- Babi	94109	110.714	118	Tercapai	
		- Domba	48	10	21	Tidak Tercapai	
		- Ayam	287.987	291.285	101	Tercapai	
		2. Jumlah Perkembangan ternak yang di IB sapi	2.250	269	101,42	tercapai	Dinas Peternakan
		3. Jumlah Luasan areal pengembangan HPT	8.00	1465,05	18313,13	Tercapai	Dinas Peternakan
		4. Persentase Menurunnya angka kematian ternak (%)	16	6	37.5	Tercapai	Dinas Peternakan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Skor)	68	0	0	Tidak Tercapai	
	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	83.4	100.60	Tercapai	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa

1. Kategori Tercapai terdapat pada indikator Jumlah Populasi ternak (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi dan Ayam) yang rata-rata capaiannya mencapai 100 %; Jumlah Luasan areal pengembangan HPT capaiannya 18313,125 %; Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB capaiannya 101,42 % dimana capaiannya dihitung jumlah IB tahun lalu ditambah jumlah IB tahun ini sehingga akumulatif dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah mencapai angka 2.282 ekor; Presentase Penurunan Angka Kematian Ternak 37,5% dan Nilai Indeks kepuasan Masyarakat 100,60 %.
2. Kategori yang tidak tercapai terlihat pada indikator Populasi Ternak domba dimana capaiannya 21 % dan Nilai SAKIP capaiannya 0, karena belum adanya penilaian dari Inspektorat Daerah

3.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Populasi Ternak						
		1. Sapi	137,421	159.318	115,93	139,246	172.064	124
		2. Kerbau	825	808	97.94	832	873	105
		3. Kuda	1.506	1.657	110.03	1.546	1.791	116
		4. Kambing	50.462	63.195	125.23	51.962	68.253	131
		5. Babi	91.518	102.513	107,73	94.109	110.714	118
		6. domba	46	-	0	48	0	21
		7. Ayam	275.465	-	97.91	287.987	291.285	101
		Perkembangan Ternak yang di IB (sapi)	2.00	655	33	2.25	269	11,95556
		Pengembangan HPT	7.75	1070,7	13.815,48	8.00	1465,05	18313,13
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Menurunnya Angka Kematian Ternak	17	9	64	16	6	37.5
		Nilai SAKIP (Skor)	62	66.7	108	68	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80.44	0	0	81.01	83.4	100.60

Dari tabel tersebut terlihat perbandingan capaian kinerja pada tahun 2022 sampai tahun 2024.

1. Pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran mengalami peningkatan capaian dari capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022 Hal ini terlihat pada capaian kinerja populasi ternak, Pengembangan HPT sebesar 18.313,125 persen, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 13.815,48 % dan tahun 2022 sebesar 12.472,62 %
2. Pada tahun 2024 terjadi juga pencapaian Perkembangan Ternak IB (akseptor) Sapi tercapai menjadi 101.42 dimana capaiannya terhitung jumlah IB tahun lalu ditambah jumlah IB tahun ini sehingga akumulatif dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sudah mencapai angka 2.282 ekor.
3. Penurunan angka kematian ternak pada tahun 2022 sebesar 15 menjadi 9 pada tahun 2023 dan menjadi 6 pada tahun 2024,
4. Nilai IKM capaiannya tahun 2022 sebesar 79,87, dan mengalami peningkatan menjadi 81,5 di tahun 2024
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik skornya di tahun 2022 sebesar 1,9, meningkat menjadi 2,09 di tahun 2023, dan menjadi 2,43 di tahun 2024
6. Capaian kinerja pada tahun 2024 tidak tercapai pada Perkembangan ternak IB (akseptor) sapi 11,9 Persen dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 33% karena kurangnya jumlah ketersediaan semen.
7. Nilai Sakip di tahun 2023 dari 100 % menjadi 0 di tahun 2024, karena belum adanya penilaian dari Inspektorat Daerah

3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2021-2026

Tabel 3.3
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi / Capaian Kinerja 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
	Meningkatnya kontribusi sector pertanian terhadap PDRB	1. Jumlah Populasi Ternak			
		- Sapi	172.064	142.896	120.41%
		- Kerbau	873	846	103.19%
		- Kuda	1.791	1.986	90.18%
		- Kambing	68.253	53.962	126.48%
		- Babi	110.714	98.610	112.27%
		- Domba	10	52	19,23%
		- Ayam	291.285	330.225	88.20%
		2. Jumlah Perkembangan ternak yang di IB (Akseptor) sapi	269	2.750	9.7%
		3. Jumlah Luasan areal pengembangan HPT (ha/KLPK)	1465,05	8.75	167,43%
		4. Persentase Menurunnya angka kematian ternak (%)	6	14	42,85%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Nilai SAKIP (SKOR)	0	80	0
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik (smart governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,4	82,15	101.03%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi di tahun 2024 tingkat kemajuan sangat tinggi melebihi target akhir 2026, Dimana ini di perhatikan beberapa indikator kinerja yaitu

1. Jumlah populasi ternak pada tahun 2024 secara umum melebihi target akhir renstra 2021-2026 dengan rincian sebagai berikut,

- ternak Sapi sebanyak 172.064 ekor sedangkan target akhir 2026 sebanyak 142,896 ekor (melebihi target)
- Ternak Kerbau sebanyak 873 Ekor sedangkan target akhir tahun 2026 sebanyak 846 ekor, (melebihi target)
- Ternak kuda sebanyak 1.791 ekor sedangkan target akhir 1.986 ekor (Mendekati target)
- Ternak Kambing sebanyak 68.253 ekor, sedanhgkan target akhir 53.962 ekor (melebihi target)
- Ternak babi 110.714 ekor sedangkan target akhir 98.610 ekor (melebihi target)Ternak Domba sebanyak 10 ekor, target akhir 50 ekor (mendekati target)
- Ternak Ayam sebanyak 291.285 ekor target akhir 330.225 ekor (Mendekati target)

3. Jumlah luasan Areal Pengembangan HPT sebesar 1465.05 ha, target akhir 8,75 ha (melebihi target)
4. Persentase penurunan angka kematian ternak 6 %, target akhir 14 % (melebihi target)
5. Nilai IKM sebesar 81.5 sedangkan target akhir 82,15 (melebihi target)

3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Jumlah Populasi Ternak				Ketersediaan HPT/pakan, meningkatnya pengetahuan petani peternak	Melakukan perluasan penanaman HPT, peningkatan SDM
		1. Sapi	139,25	172.064	124		
		2. Kerbau	832	873	105		
		3. Kuda	1.546	1.791	116		
		4. Kambing	51.962	68.253	131		
		5. Babi	94.109	110.714	118		
		6. domba	48	10	21		
		7. Ayam	287.987	291.285	101		
		Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB	2.250	269	101.42	-Kesadaran petani/peternak dalam meningkatkan mutu bibit ternak sapi -Tersedianya SDM Petugas IB	- Pengadaan bibit Semen dalam memenuhi permintaan petani/Peternak -Pelayanan Petugas IB yang tepat sasaran dalam melakukan IB
		Jumlah luasan areal Pengembangan HPT	8.00	1465,1	18313	Kebutuhan petani/peternak dalam pemenuhan pakan ternak	Dinas Peternakan (Bidang Produksi Ternak dan Pakan) membagikan bibit lamtoro terambah dan juga ikut melakukan penanaman bersama masyarakat yang menyediakan lahan HPT
Persentase penurunan Angka Kematian Ternak	16	6	37.5	Ketersediaan Vaksin	Koordinasi dengan BPBD Propinsi dan LSM		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Skor)	68	0	0	Pemahaman dokumen yg dibutuhkan	Peningkatan koordinasi
3	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	83.4	100.60	Pemberian Bantuan sapi TERASA	Adanya Peningkatan Kualitas Pelayanan dari Resort kecamatan dan bidang Produksi Ternak dan Pakan dalam pemberian bantuan TERASA.

3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Populasi Ternak				RP. 2.054.935.390	Rp. 2.030.870.339	98,33	1.18
	1. Sapi	139,246	172.064	124				
	2. Kerbau	832	873	105				
	3. Kuda	1.546	1.791	116				
	4. Kambing	51.962	68.253	131				
	5. Babi	94.109	110.714	118				
	6. domba	48	0	21				
	7. Ayam	287.987	291.285	101				
2	Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB	2.250	269	101,42	RP. 2.054.935.390	Rp. 2.030.870.339	98.33	1.18
3	Jumlah luasan areal Pengembangan	8.00	1465,05	18313,13	RP. 2.054.935.390	Rp. 2.030.870.339	98.33	1.8
4	Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak	16	6	37.5	Rp. 367.194.995	Rp. 304.726.770	92.50	20.49
5	Nilai SAKIP (Skor)	68	0	0				
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	83.4	100.60				28.32

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa

1. Indikator Jumlah populasi ternak, Jumlah Perkembangan Ternak yang di IB dan Jumlah luasan areal Pengembangan HPT Tingkat efisiennya adalah 1.18
2. Indikator Persentase Penurunan Angka Kematian Ternak, Tingkat efisiennya 20.49
3. Indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat, Tingkat efisiensinya 0 karena Dinas Peternakan belum mengalokasikan sejumlah dana tertentu guna menunjang indikator kerja tersebut.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1.	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	Populasi Ternak		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			
		1. Sapi	124	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT dalam daerah kabupaten/kota	100	MENUNJANG
		2. Kerbau	105				
		3. Kuda	116				
		4. Kambing	131				
		5. Babi	118				
		6. domba	21				
		7. Ayam	101				
		Perkembangan Ternak yang di IB	11,955556				
		Pengembangan HPT	18313,125				
		Menurunnya Angka Kematian Ternak	37.5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit Hewan menular dalam kab/kota	85	MENUNJANG
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Skor)	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daderah Kabupaten/Kota , dengan kegiatan :	Jumlah Dokumen dan atau Laporan tentang Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		MENUNJANG
	Meningkatnya kualitas layanan publik (smart governance)	Indeks Kepuasan Masyarakat	100.60	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	MENUNJANG

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Analisis Program/kegiatan yang menunjang/tidak menunjang pencapaian kinerja Dinas Peternakan Kabupaten TTU Tahun 2024 mempunyai 3 Program Utama dengan 4 kegiatan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis yang ada dalam IKU dan 1 Program Penunjang dengan 6 kegiatan. Sedangkan Target PAD sebesar Rp. 750.000.000, realisasinya sebesar Rp 81.475.000 dengan capaiannya sebesar 10,86%.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.7					
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan					
No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah				
	1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen dan atau Laporan tentang Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	71.999.434	71.877.900	99.86
	2. Administrasi keuangan Perangkat daerah	Jumlah Administrasi keuangan Perangkat daerah	4.911.333.244,66	3.772.897.316	88.17
	3. Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1.000.000.000,00	10.000.000	100
	4. Administrasi Umum Perangkat daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat daerah	85.496.199	85.096.550	99.59
	5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	43.023.217	40.779.927	97.73
	6. Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	57.996.412	55.947.384	97.20
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan HPT dalam daerah kabupaten/kota	2.054.935.390	2.030.870.339	97.09
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				
	Pembangunan prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan prasarana Pertanian	472.499.796	472.499.796	100
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit Hewan menular dalam kab/kota	Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit Hewan menular dalam kab/kota	341.999.528	279.673.270	81.78
	Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab./Kota	Jumlah Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab./Kota	25.195.467	25.053.500	99.37

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara menetapkan sebanyak 2 tujuan, 3 sasaran dengan 6 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 sasaran 1 terdiri dari 4 indikator kinerja dengan capaian kinerja untuk Populasi Ternak sebesar 112,418 % , Perkembangan ternak yang di IB sapi sebesar 101,42 % , Pengembangan HPT (ha/KLPK) 18313,13, persentase Menurunnya angka kematian ternak (%) sebesar 37,5%.
- Tujuan 2 Sasaran ke 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar 0 % karena belum adanya penilaian dari Inspektorat.
- Tujuan 2 Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai IKM sebesar 100,60%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 8 sasaran tersebut, terdapat 1 sasaran dan 1 indikator yang tidak mencapai target, namun secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar 750.000.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai 81.475.000 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 10,86%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten/Kota.

Kefamenanu, Februari 2025



KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

 TRIMELDUS T. TONBESI, S.Pt., M.Sc
Pembina Tk. I
NIP.19700515 199903 1 013